

Cakung dan Jepara. Jika permasalahan itu digali secara mendalam, maka dapat dipetakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hisab dan rukyat untuk penetapan awal bulan Kamariah menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Gresik.
2. Syarat menjadi saksi rukyat hilal menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
3. Pengetahuan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik mengenai persoalan penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
4. Pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
5. Kekuatan hukum penolakan hasil kesaksian rukyat hilal oleh Pemerintah sebagai *Ūlīl amri* menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.

Masalah di atas masing sangat luas pembahasannya, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah untuk hasil yang lebih terfokus dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalahnya adalah mengenai pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan

2. Bagaimana analisis pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah penetapan awal bulan Kamariah sebenarnya sudah ada yang membahasnya, hanya saja tentang titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya yang berbeda.

Penelitian yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah ditulis oleh Laelatul Fauziah pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Perbedaan Penetapan Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang *Īsbāt* Kesaksian Rukyat Hilal Tahun 2007 (Dalam Hal Tidak Melihat Hilal)”. Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni 1) mengapa terjadi perbedaan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal tahun 2007 di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya, dan 2) bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap perbedaan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal tahun 2007 di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban bahwa perbedaan penetapan antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya disebabkan perbedaan dalam memahami dan memberlakukan hukum acara

(formil) penyelesaian perkara permohonan sidang *isbāt* kesaksian rukyat hilal. Di Pengadilan Agama Gresik permohonan tersebut dianggap sebagai perkara yang bersifat permohonan (voluntair) sedangkan di Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut dianggap sebagai kewenangan yang penyelesaiannya di luar perkara pada umumnya, karena belum ada petunjuk teknis berupa pola administrasi perkara sehingga penyelesaian permohonannya tidak terikat oleh teknis litigasi hukum acara, dan pelaksanaannya bersifat koordinatif antara Pengadilan Agama dan Departemen Agama.

Sedangkan dari rumusan masalah yang kedua ditemukan jawaban bahwa dari segi hukum acara Peradilan Agama, pelaksanaan penyelesaian permohonan *isbāt* kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal di Pengadilan Agama Gresik, maka proses pelaksanaannya seperti penyelesaian perkara voluntair pada umumnya yakni dilaksanakan sampai dikeluarkannya produk hukum berupa penetapan. Sedangkan pelaksanaan penyelesaian permohonan *isbāt* kesaksian rukyat hilal di Pengadilan Agama Surabaya ketika hilal tidak terlihat maka tidak dibuat penetapan dan proses penyelesaian permohonannya hanya dianggap sebagai kewenangan di luar perkara, dan belum sepenuhnya menggunakan pedoman dan petunjuk Mahkamah Agung tentang *isbāt* kesaksian rukyat hilal.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Zakie Fitrie Musthofa pada tahun 2008 dengan judul “ Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama”. Skripsi ini mempunyai tiga

rumusan masalah, yakni 1) mengapa PWNu Jawa Timur menerima hasil laporan rukyat hilal dan mengikhbarkan bahwa pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 Oktober 2006, 2) mengapa PBNU menolak hasil rukyat tersebut, 3) bagaimana seharusnya warga Nahdliyin menyikapi perbedaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, kemudian ditemukan jawaban untuk rumusan masalah pertama adalah para *ḥasīb* warga Nahdliyin yang masih menggunakan sistem lama tetap berpedoman pada sistem lama tersebut, dan PWNu Jawa Timur menerima hasil laporan pelaku rukyat dan mengikhbarkan bahwa pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 Oktober 2006 karena ikhbar tersebut sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil muktamar NU, maka PWNu Jawa Timur tidak mempersoalkan putusan Menteri Agama.

Jawaban dari rumusan masalah yang kedua adalah PBNU menolak rukyat tersebut karena ketika hilal muncul waktunya hanya diperkirakan saja. Ketika hilal terlihat tidak langsung dicocokkan dengan hasil perhitungan, dan keadaan cuacanya mendung.

Sikap yang seharusnya diambil warga Nahdliyin dalam menghadapi perbedaan 1 Syawal 1427 H agar bisa berhari raya di hari yang sama, diantaranya sebagai berikut: a) para *ḥasīb* warga Nahdliyin yang masih menggunakan sistem lama disarankan menggunakan sistem modern (*ephemeris*), b) seorang perukyat

diharapkan penglihatannya normal, dan benar-benar jeli memperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan rukyat termasuk waktu hilal terlihat termasuk kejujuran perukyat, c) bagi golongan awam disarankan untuk memahami ilmu tersebut. Paling tidak mengikuti anjuran Pemerintah karena dalam hal penetapan 1 Syawal 1427 H, Pemerintah yang mempunyai kuasa.

Skripsi yang serupa juga ditulis oleh M. Syukron Habiburrahman pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (Kajian Tentang Otoritas *Uḥlī amri*)” “dalam skripsi ini mempunyai satu rumusan masalah, yakni bagaimanakah kekuatan hukum keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal. Dari penelitian tersebut kemudian ditemukan jawaban bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, runtut mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai Konstitusi UUD 1945, sehingga penetapan tersebut bersifat umum dan mengikat.

Syafi’i pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbat* Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”. Dalam skripsi ini mempunyai tiga rumusan masalah, yakni 1) bagaimana pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Kamariah, 2)

bagaimana pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Kamariah, 3) bagaimana studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* Pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Penelitian yang dilakukan ini, kemudian ditemukan jawaban bahwa tokoh struktural PWNU Jawa Timur memandang *isbāt* Pemerintah lebih diposisikan sebagai jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi selama ini dalam penentuan awal bulan Kamariah. Pandangan ini sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU ke 20 di Surabaya, Pemerintah hanya akan diikuti ketika keputusan yang diambil berdasar *ru'yah* atau *istikmāl*.

Sedangkan secara umum para tokoh Struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur memandang *isbāt* Pemerintah hanya sebagai otoritas, artinya hanya memiliki kewenangan berdasarkan kekuasaan saja. Dalam hal ini *isbāt* Pemerintah akan diikuti, jika Pemerintah dalam hal memutuskan awal bulan Kamariah bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syari'at dan data astronomis yang valid.

Keharusan mengikuti *isbāt* Pemerintah memang tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam. Namun, mengingat perbedaan penentuan awal bulan Kamariah cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat muslim dan bisa memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak dalam masyarakat, maka *ūlīl amri* (Pemerintah) mempunyai wewenang mengatur demi

sembilan sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dihimpun, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta menjelaskan sistematika pembahasan.

Setelah pembahasan mengenai rancangan penelitian yang diuraikan dalam bab pertama selesai, maka hal selanjutnya yang diuraikan dalam bab kedua dengan judul “Realitas Eksternal Seputar Saksi Rukyat Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah” meliputi kuantitas dan kualitas saksi rukyat hilal yang sah, dan kesaksian yang tidak sesuai dengan hasil hisab menurut pandangan ulama fikih.

Sedangkan pemaparan tentang data hasil penelitian dituangkan dalam bab ketiga dengan judul “ Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik Terhadap Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H” yang di dalamnya meliputi profil singkat Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik, pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H.

Data mengenai pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal

dalam penetapan 1 Syawal 1432 H tersebut kemudian dipetakan dengan menggunakan sudut pandang legal-formal dan empiris dan juga dilakukan analisis verifikatif dengan menggunakan nalar *fiqhiyah* dalam bab keempat dengan judul “ Analisis Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik Terhadap Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H”.

Sebagai penutup dari penelitian ini, maka pada bab kelima disajikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran seputar saksi rukyat hilal.

